



Rabu, 23 November 2011

Sesalkan Tanah Pemerintah Tidak Bersertifikat

Mujidi

Borneo Tribune, *Bengkayang*

Sarina mensesalkan kondisi ratusan hektar tanah milik Pemda Kabupaten Bengkayang yang belum memiliki sertifikat berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2010. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu disclaimer sebab beberapa aset daerah belum jelas, termasuk tanah milik sekolah-sekolah, rumah sakit, maupun beberapa kantor dinas.

“Hal ini sangat ironis sehingga wajar bila kinerja BPN Bengkayang dipertanyakan,” kata anggota DPRD Bengkayang ini saat ditemui.

Dikatakan Sarina, terkait perkantoran yang belum bersertifikat pihaknya akan memanggil kepala BPN Bengkayang. Pemanggilan itu sebagai bentuk penyelamatan aset daerah. Namun untuk aset itu harus difasilitasi pihak pemerintah provinsi.

“Pihak Provinsi belum memfasilitasi terkait pemilikan aset daerah eks

Kabupaten Sambas, serta banyak laporan juga dari masyarakat kalau BPN telah mengeluarkan sertifikat secara tumpang tindih sehingga timbul permasalahan dimasyarakat, jadi kita akan meminta BPN agar dapat melaksanakan tugas dengan benar, jangan hanya mengejar materi berupa uang saja karena pada dasarnya BPN adalah perwakilan di daerah yang harus bisa menata keabsahan pertanahan di masyarakat bukannya sebaliknya bertindak sebagai Mafia Pertanahan,” terangnya.

Esidorus. SP, sekretaris Gapensi, menjadi korban BPN. Menurutnya, dirinya juga sudah mengajukan pembuatan sertifikat 3 tahun yang lalu, namun hingga kini sertifikat tidak kunjung selesai.

“Sebesar sembilan juta rupiah sudah saya lunasi, dan itupun melalui Proyek Prona di Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar, tetapi berdasarkan keterangan jika pihak BPN masih sedang dalam proses,” jelas Esidorus. □